

KEBERADAAN DAN KOMPETENSI TENAGA KEPENDIDIKAN DI SMA NEGERI SEKABUPATEN BLITAR

Puguh Santoso

Pengawas SMA Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten dan Kota Blitar

puguh.blitar@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui keberadaan dan kompetensi Tenaga Kependidikan di SMA Negeri sekabupaten Blitar. Penelitian ini menggunakan metode evaluasi dengan model discrepancy. Responden penelitian berjumlah 45 orang, terdiri dari 3 Kepala Tenaga Administrasi Sekolah; 18 Tenaga Administrasi Sekolah dan 24 petugas layanan khusus. Pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan angket. Analisis data dilakukan secara deskriptif kuantitatif. Dari penelitian ini diperoleh kesimpulan sebagai berikut: (1) Keberadaan Kepala Tenaga Administrasi Sekolah di SMA Negeri sekabupaten Blitar masih belum memadai (43,86%) namun kualifikasi akademiknya sudah memadai (S.1 dan S.2) serta memiliki sertifikat; (2) Keberadaan Tenaga Administrasi Sekolah di SMA Negeri sekabupaten Blitar belum memadai (39,98%) namun kompetensi sudah memadai (72,22%); (3) Keberadaan petugas layanan khusus di SMA Negeri sekabupaten Blitar sudah memadai walaupun masih berstatus PTT (66,67%) dengan kompetensi yang sudah memadai (60%).

Kata Kunci

kompetensi,
kualifikasi, tenaga
administrasi

Cara mengutip: Santoro, Puguh (2018) Keberadaan dan Kompetensi Tenaga Kependidikan di SMA Negeri Sekabupaten Blitar. *Nusantara of Research*, 5(2), 53-60.

PENDAHULUAN

Dalam bidang pendidikan, dikenal tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang semuanya memiliki profesi yang saling berkaitan, meskipun dalam lingkup dan tugas yang berbeda. Tenaga pendidik dan kependidikan memegang peranan strategis dalam upaya pembentukan karakter bangsa serta peningkatan kualitas SDM (sumber daya manusia), mengingat di era globalisasi ini persaingan semakin ketat dikarenakan oleh pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sehingga sumber daya manusia menjadi aspek yang penting. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan tantangan tersendiri bagi pendidik dan tenaga kependidikan. Mereka dituntut untuk dapat mengikuti laju perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sehingga dibutuhkan suatu standar kompetensi bagi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan untuk mengembangkan diri di bidang pendidikan demi peningkatan kualitas mutu pendidikan.

Menurut Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 1 ayat 5 dan 6 yang dimaksud dengan tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Dimana tenaga kependidikan tersebut memenuhi syarat yang ditentukan oleh undang-undang yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang, disertai tugas dalam suatu jabatan dan digaji pula menurut aturan yang berlaku.

Tenaga kependidikan merupakan tenaga yang bertugas merencanakan dan melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan yang selanjutnya juga disebut dengan tenaga administrasi sekolah (TAS). Sedangkan pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. (UU No.20 Tahun 2003, Pasal 39 ayat 2). Dalam penelitian ini penulis ingin mengetahui bagaimanakah keberadaan dan kompetensi yang dimiliki oleh tenaga administrasi sekolah (TAS) di SMA Negeri sekabupaten Blitar baik jumlah maupun kompetensinya, apakah sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 tahun 2008.

Berdasarkan pengamatan dilapangan, ada beberapa SMA Negeri di Kabupaten Blitar yang aktivitas pembelajarannya belum didukung penyelenggaraan administrasi yang memadai dan bahkan ada SMA Negeri yang tidak memiliki tenaga administrasi sekolah dengan status PNS. Akibatnya, kegiatan yang bersifat administratif tidak bisa berjalan dengan baik. Semua bentuk organisasi, termasuk sekolah harus didukung oleh tenaga administrasi yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi tertentu. Unit organisasi yang mengelola kegiatan administrasi di sekolah biasa disebut dengan bagian administrasi sekolah yang dalam struktur organisasi sekolah, bagian administrasi sekolah, menduduki tempat di bawah kepala sekolah.

Bagian administrasi sekolah dipimpin oleh seorang kepala administrasi sekolah yang harus memenuhi kualifikasi dan kompetensi tertentu. Kepala administrasi sekolah membawahi sejumlah tenaga administrasi sekolah yang bertugas memberikan pelayanan kepada warga sekolah mulai dari kepala sekolah, guru hingga tenaga kependidikan lainnya maupun masyarakat luar sekolah sebagai pengguna jasa sekolah. Dukungan tenaga administrasi sekolah juga sangat diperlukan untuk memperlancar pelaksanaan kegiatan rutin dan pengembangan sekolah. Bagian ini bertugas memamanajemen semua keperluan penyelenggaraan aktivitas sekolah dan pengambilan keputusan serta kebijakan oleh Kepala Sekolah. Tenaga administrasi sekolah merupakan cerminan satu tubuh yang memiliki tangan-tangan dengan masing-masing tangan memegang sub bagian yang saling berkaitan. Jika salah satu tangan diantara tangan-tangan tersebut terganggu, maka semua kegiatan layanan administrasi tentunya akan ikut terganggu. Sebagai misal jika sekolah yang bagian sarananya tidak berjalan dengan benar, maka kegiatan pembelajaran di sekolah tersebut tentu tidak akan berjalan dengan maksimal.

Dari paparan diatas tampak perlunya syarat kompetensi minimal tenaga administrasi sekolah yang jelas. Hal ini sudah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 tahun 2008, tentang pengkategorian tenaga administrasi sekolah dalam 3 jenis, yaitu: (1) kepala tenaga administrasi sekolah, (2) pelaksana urusan, dan (3) petugas layanan khusus. Kepala tenaga administrasi sekolah, bertugas untuk mengkoordinir semua tugas tenaga administrasi sekolah. Pelaksana urusan bertugas melaksanakan bagian tugas yang telah dibebankan oleh kepala tenaga administrasi sekolah. Bagian Pelaksana Urusan terdiri dari beberapa urusan, yaitu: (1). urusan kepegawaian; (2). urusan kesiswaan; (3). urusan keuangan;

(4). urusan kurikulum; (5). urusan administrasi dan persuratan; (6). urusan hubungan masyarakat (humas), dan (7). urusan sarana prasarana sedangkan petugas layanan khusus merupakan petugas yang mengurus aktivitas diluar kantor, misalnya penjaga sekolah, tenaga kebersihan, petugas keamanan (satpam). Tenaga administrasi sekolah tersebut dituntut memiliki kualifikasi pendidikan dan kompetensi yang sesuai dengan bagian tugasnya dan untuk seorang kepala Tenaga Kependidikan harus memiliki kompetensi: manajerial, kepribadian, sosial, dan teknis.

METODE

Penelitian ini dilakukan pada 7 SMA Negeri di wilayah Kabupaten Blitar pada bulan Januari sampai dengan bulan Maret 2018. Penelitian ini tergolong penelitian penilaian (*evaluation research*) yang menggunakan model kesenjangan (*discrepancy model*). Tolok ukur keberhasilan diambil dari kesesuaian dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 24 tahun 2008 tentang standar tenaga administrasi sekolah/madrasah yang mencapai diatas 60%. Populasi penelitian ini adalah tenaga administrasi di SMA Negeri sekabupaten Blitar.

Data diperoleh dengan menggunakan kuesioner tertutup yang disusun mengacu pada standar kualifikasi dan kompetensi tenaga administrasi (kependidikan) sebagaimana termuat dalam Permendiknas Nomor 24 tahun 2008. Respon jawaban disediakan sesuai dengan ketentuan persyaratan kualifikasi yang ada pada standar tenaga administrasi sekolah yang terdiri dari 2 pilihan (sesuai dan kurang sesuai). Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif kuantitatif dalam bentuk prosentase berdasarkan tingkat kesesuaian dengan persyaratan untuk tenaga administrasi (kependidikan).

Secara keseluruhan, prosedur deskripsi dan analisis data dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut: pertama dipaparkan karakteristik responden, dilanjutkan dengan analisis tentang kesesuaian data dengan kualifikasi dan kompetensi tenaga administrasi sekolah yang tercantum pada Permendiknas nomor 24 tahun 2008. Langkah terakhir adalah menarik kesimpulan dan mengajukan saran/rekomendasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan tenaga administrasi sekolah.

HASIL

Kepala Tenaga Administrasi

Data yang diperoleh dari responden, menunjukkan bahwa tidak semua sekolah memiliki kepala tenaga administrasi sekolah. Dari 7 sekolah yang diteliti, hanya ada 3 (tiga) sekolah yang memiliki kepala tenaga kependidikan dengan kwalifikasi pendidikan S.2 (1 orang) dan S.1 (2 orang). Dilihat dari segi persyaratan untuk kepala tenaga administrasi SMA adalah berpendidikan minimal S.1 program studi yang relevan dengan pengalaman kerja sebagai tenaga administrasi sekolah/madrasah minimal 4 (empat) tahun, atau D3 dan yang sederajat, program studi yang relevan, dengan pengalaman kerja sebagai tenaga administrasi sekolah/madrasah minimal 8 (delapan) tahun. Selain itu, juga harus memiliki sertifikat kepala tenaga administrasi sekolah/madrasah yang dikeluarkan oleh lembaga yang ditunjuk oleh

pemerintah atau pemerintah daerah, dengan demikian ketiganya telah memenuhi syarat. Jika dilihat dari pengalaman kerja, ketiganya telah memenuhi syarat karena memiliki pengalaman kerja lebih dari 4 tahun. Keberadaan kepala tenaga administrasi dapat dilihat pada tabel 1.

Dilihat dari segi kompetensi yang harus dimiliki oleh kepala tenaga administrasi SMA meliputi 4 aspek, yaitu: manajerial, sosial, kepribadian, dan teknis. Dari hasil angket yang disebar ke 3 orang kepala tenaga administrasi sekolah berkaitan dengan kompetensi manajerial, kepribadian, sosial dan teknis seluruhnya (100%) memadai. Data tentang Kompetensi kepala tenaga administrasi sekolah di SMA Negeri se-Kabupaten Blitar dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 1. Keberadaan kepala tenaga administrasi di SMA Negeri Sekabupaten Blitar

No.	Inisial Sekolah	Kepala Tenaga Administrasi	Pendidikan	Sertifikat Ada/Tidak	Masa Kerja
1	Sr	1	S.1	Ada	12
2	Pg	1	S.2	Ada	6
3	Kd	0	0	Tidak	0
4	Sj	1	S.1	Ada	13
5	Gr	0	0	Tidak	0
6	TI	0	0	Tidak	0
7	Kb	0	0	Tidak	0
Jumlah		3			
Rata ²		0,43			
Rata ² %		43,86%			

Sumber: data hasil angket

Tabel 2. Kompetensi kepala tenaga administrasi sekolah

No	Inisial Sekolah	Memadai		Kurang Memadai	
		Jml	%	Jml	%
1	Sr	1	100	0	0,00
2	Pg	1	100	0	0,00
3	Kd	0	0,00	0	0,00
4	Sj	1	100	0	0,00
5	Gr	0	0,00	0	0,00
6	TI	0	0,00	0	0,00
7	Kb	0	0,00	0	0,00
Jumlah		3	100	0	0,00

Sumber: data hasil angket

Tenaga Administrasi

Dilihat dari keberadaan tenaga administrasi sekolah, tidak semua SMA Negeri di Kabupaten Blitar memiliki tenaga administrasi sekolah dengan status PNS. Prosentase Tenaga administrasi sekolah dengan status PNS yang dimiliki SMA Negeri di Kabupaten Blitar hanya 32% sehingga dapat dikatakan masih kurang memadai. Keberadaan tenaga administrasi dapat dilihat pada tabel 3.

Jika dilihat dari persyaratan kualifikasi pendidikan yang harus dipenuhi oleh pelaksana urusan administrasi untuk SMA adalah serendah-rendahnya berijazah SMA/SMK. Seluruh pelaksana urusan sudah berijazah minimal SMA/SMK. Pelaksana urusan Kepegawaian, Keuangan, Humas, Kesiswaan, Sarana dan Prasarana, Persuratan & Arsip dan urusan kurikulum yang berijazah lebih rendah dari SMA tidak ada, semuanya berijazah SMA dan lebih tinggi dari SMA. Data tersebut menunjukkan bahwa seluruh tenaga administrasi

sekolah di SMA Negeri sekabupaten Blitar yang masuk dalam kelompok pelaksana urusan, seluruhnya sudah memenuhi persyaratan kualifikasi pendidikan sesuai Permendiknas Nomor 24 tahun 2008.

Tabel 3: Keberadaan tenaga administrasi di SMA Negeri Sekabupaten Blitar

No.	Pelaksana Urusan	Jumlah PNS	Prosentase
1	Urusan Kepegawaian	5	71%
2	Urusan Keuangan	6	86%
3	Urusan Sarpras	3	29%
4	Urusan Humas	2	14%
5	Urusan Persuratan dan Arsip	2	14%
6	Urusan Kesiswaan	0	0%
7	Urusan Kurikulum	0	0%
Prosentase Rata ²		18	32%

Sumber: data hasil angket

Kompetensi yang harus dimiliki tenaga administrasi SMA meliputi 4 aspek, yaitu: manajerial, sosial, kepribadian, dan teknis. Dari hasil angket yang disebar ke 18 orang tenaga administrasi sekolah berkaitan dengan kompetensi manajerial, kepribadian dan sosial seluruhnya (100%) memiliki kompetensi memadai sedangkan untuk kompetensi teknis, 72,22% memiliki kompetensi memadai. Data tentang Kompetensi teknis tenaga kependidikan SMA Negeri di Kabupaten Blitar dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 4. Kompetensi teknis

No	Pelaksana Urusan	Memadai		Kurang Memadai	
		Jml	%	Jml	%
1	Kepegawaian	3	16,67	0	0,00
2	Keuangan	4	22,22	1	5,56
3	Sarana prasarana	3	16,67	3	16,67
4	Humas	1	5,56	1	5,56
5	Persuratan + Arsip	1	5,56	0	0,00
6	Kesiswaan	1	5,56	0	0,00
7	Kurikulum	0	0,00	0	0,00
Jumlah		13	72,22	5	27,78

Sumber: data hasil angket

Petugas Layanan Khusus

Untuk keberadaan tenaga administrasi yang masuk dalam kelompok petugas layanan khusus, semua sekolah tidak memiliki petugas yang berstatus PNS, tetapi semua sekolah yang diteliti memiliki tenaga layanan khusus dengan status petugas tidak tetap (PTT) walaupun demikian tidak seluruh sekolah yang diteliti memiliki semua jenis petugas layanan khusus. SMA Negeri di Kabupaten Blitar rata-rata memiliki tukang kebun (66,66%); tenaga kebersihan (66,66%); Pengemudi (33,33%); pesuruh (66,66%); Satpam (100,00%) dan penjaga sekolah (66,66%) seperti tampak pada Tabel 5.

Adapun kualifikasi pendidikan petugas layanan khusus tersebut, semuanya berpendidikan SMA/SMK dan lebih rendah dari SMA/SMK sedangkan yang lebih tinggi dari SMA/SMK tidak ada. Kompetensi petugas layanan khusus untuk jenjang SMA meliputi 3 hal yaitu: kepribadian, sosial, dan teknis. Untuk kompetensi kepribadian dan kompetensi sosial, kondisinya sama, penjaga sekolah 100,00% memadai. Untuk kompetensi teknis, berdasarkan data hasil angket dapat dijelaskan sebagai berikut: tukang kebun, 100,00% memadai; tenaga

kebersihan 75,00% memadai; pengemudi semuanya (100%) memadai; pesuruh 100,00% memadai; satpam 83,33% memadai; penjaga sekolah 100,00% memadai. Data lengkap kompetensi teknis petugas layanan khusus dapat dilihat pada Tabel 6.

Tabel 5. Keberadaan Petugas Layanan Khusus

No	Jenis Petugas	Jumlah	Rata-rata	%
1	Tukang kebun	4	0,66	66,66 %
2	Tenaga kebersihan	4	0,66	66,66 %
3	Pengemudi	2	0,33	33,33 %
4	Pesuruh	4	0,66	66,66 %
5	Satpam	6	1	100,00 %
6	Penjaga sekolah	4	0,66	66,66 %
Jumlah		24	4,83	66,67 %

Sumber: data hasil angket

Tabel 6. Kompetensi Teknis Petugas Layanan Khusus

No	Petugas Layanan Khusus	Memadai		Kurang Memadai	
		Jml	%	Jml	%
1	Tukang kebun	4	100,00	0	00,00
2	Tenaga kebersihan	3	75,00	1	25,00
3	Pengemudi	2	100,00	0	00,00
4	Pesuruh	4	100,00	0	00,00
5	Satpam	5	83,33	1	16,67
6	Penjaga sekolah	4	100,00	0	00,00
Jumlah		22	558,33	2	41,67
Rata-rata		3,66	93,05	0,33	6,95

Sumber: data hasil angket

PEMBAHASAN

Kepala Tenaga Administrasi

Keberadaan kepala tenaga administrasi sekolah pada 7 sekolah yang diteliti, hanya 3 (tiga) sekolah yang memiliki kepala tenaga administrasi, dengan demikian keberadaan tenaga administrasi sekolah di SMA Negeri se Kabupaten Blitar masih kurang memadai (32%). Dilihat dari segi persyaratan untuk kepala tenaga administrasi SMA adalah berpendidikan minimal S.1 program studi yang relevan dengan pengalaman kerja sebagai tenaga administrasi sekolah/madrasah minimal 4 (empat) tahun, atau D3 dan yang sederajat, program studi yang relevan, dengan pengalaman kerja sebagai tenaga administrasi sekolah/madrasah minimal 8 (delapan) tahun. Selain itu, juga harus memiliki sertifikat kepala tenaga administrasi sekolah/madrasah yang dikeluarkan oleh lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah atau pemerintah daerah, dengan demikian ketiganya telah memenuhi syarat. Jika dilihat dari pengalaman kerja, ketiganya telah memenuhi syarat karena memiliki pengalaman kerja lebih dari 4 tahun. Dengan demikian 3 (tiga) orang Kepala Administrasi Sekolah sudah memenuhi syarat.

Tenaga Administrasi

Keberadaan tenaga administrasi sekolah dengan status PNS, prosentasenya hanya 32% sehingga dapat dikatakan masih belum memadai. Kompetensi tenaga administrasi

sekolah berkaitan dengan kompetensi manajerial, kepribadian dan sosial seluruhnya (100%) memadai dan kompetensi teknis, (72,22%) memadai.

Kompetensi petugas layanan khusus

Keberadaan petugas layanan khusus di SMA Negeri se Kabupaten Blitar, sebesar 88,89%, jumlah ini sudah memadai walaupun masih dengan status PTT. Kompetensi kepribadian dan kompetensi sosial, 100,00% memadai, dan Untuk kompetensi teknis, penjaga sekolah 90,91% memadai; tukang kebun, 66,67% memadai; petugas kebersihan 83,33% memadai; pengemudi semuanya (100%) memadai; pesuruh 83,33% memadai

KESIMPULAN DAN SARAN

Dari hasil pengolahan data tentang tenaga administrasi sekolah di SMA Negeri se Kabupaten Blitar sebagaimana dipaparkan pada pembahasan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: Bagi kepala tenaga administrasi sekolah: a) Keberadaan kepala tenaga administrasi sekolah masih belum memadai; b) Kompetensi kepala administrasi sekolah yang ada (3 orang) berkaitan dengan kompetensi manajerial, kepribadian dan sosial sudah memadai; c) Kompetensi teknis, sudah memadai. Bagi tenaga Administrasi Sekolah: a) Keberadaan tenaga administrasi sekolah belum memadai; b) Kompetensi tenaga administrasi sekolah berkaitan dengan kompetensi manajerial, kepribadian dan sosial sudah memadai; c) Kompetensi teknis, sudah memadai. Bagi petugas layanan khusus: a) Keberadaan petugas layanan khusus sudah memadai walaupun statusnya masih PTT; b) Kompetensi kepribadian dan sosial petugas layanan khusus berkaitan sudah memadai; c) Kompetensi teknis petugas layanan khusus, sudah memadai.

Sedangkan saran yang dapat diberikan berdasarkan temuan penelitian sebagaimana dipaparkan di atas, adalah sebagai berikut: 1) Kepada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa timur melalui Kepala Cabang Dinas Wilayah Kabupaten dan Kota Blitar, hendahnya menambah jumlah tenaga administrasi yang ada di SMA Negeri se Kabupaten Blitar; 2) Melakukan sosialisasi lebih intens terhadap Permendiknas (khususnya nomor 24 tahun 2008 tentang tenaga administrasi sekolah dan Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional) sehingga kompetensi tenaga administrasi di SMA Negeri se Kabupaten Blitar dapat lebih ditingkatkan; 3) Melakukan pembinaan teknik bagi petugas layanan khusus melalui pengawas sekolah.

DAFTAR RUJUKAN

Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). (2006). *Naskah Akademik Standar Pengelolaan Pendidikan*.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 tahun 2008 *tentang Standar Tenaga Administrasi Sekolah/Madrasah*.

Sukirman, Hartati dkk. 2007. *Administrasi dan Supervisi Pendidikan*. Yogyakarta : UNY Press.

Undang-Undang No 20 Tahun 2003 *tentang Sistem Pendidikan Nasional*.

Wahjosumidjo. 1999. Kepemimpinan Kepala Sekolah. Jakarta : PT raja Grafindo Persada.

-----, 2007. Peran Kepala Tata usaha Dalam Mendukung Keberhasilan Sekolah. *Artikel Jurnal*.